
Analisis Sumber Dana Pendidikan SMK Swasta St Nahanson Parapat Sipoholon

Hotmarito Hutabarat¹, Tia Murni Tampubolon², Rapita Banjarnahor^{3*}, Rico Sihotang⁴, Tetti Manullang⁵

Manajemen Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung¹

Manajemen Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung²

Manajemen Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung³

Manajemen Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung⁴

Manajemen Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung⁵

¹Email : romahutabarat773@gmail.com

²Email : tampubolontiamurni@gmail.com

³*Email : rapitabanjarnahor61@gmail.com

⁴Email : ricosihotang19@gmail.com

⁵Email : tettyhilda6@gmail.com

ABSTRAK

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diharapkan, dana yang memadai sangat penting untuk mendukung berbagai aspek pembiayaannya. Kualitas pendidikan tidak dapat ditingkatkan tanpa adanya alokasi sumber daya keuangan yang cukup. Penelitian ini dilakukan di SMKS St. Nahanson Parapat dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan yang digunakan oleh lembaga ini. Memahami sumber pendanaan dianggap krusial dalam manajemen lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Tujuannya adalah untuk menjelaskan dan menggambarkan informasi yang diperoleh dari lapangan sebagai data dalam penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di SMKS St. Nahanson Parapat Sipoholon, dengan subjek penelitian adalah kepala sekolah di SMKS St. Nahanson Parapat Sipoholon. Metode analisis data yang digunakan mengacu pada teori Miles dan Huberman, yang terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut: 1). Pengumpulan Data: Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. 2). Reduksi Data: Peneliti melakukan seleksi kembali terhadap data yang telah terkumpul pada tahap analisis data. 3). Penyajian Data: Data yang telah direduksi disajikan oleh peneliti pada tahap ini. 4). Penarikan Kesimpulan: Sebelum menarik kesimpulan, peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap data yang telah dikumpulkan. Pendanaan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, dan harus dikelola dengan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik juga merupakan prinsip penting dalam pengelolaan dana pendidikan. Sumber dana ini sangat menentukan dalam efektivitas dan efisiensi manajemen pendidikan. Sumber-sumber dana pendidikan untuk SMKS St. Nahanson Parapat meliputi: 1) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat, 2) Iuran SPP dari Peserta didik, 3) Yayasan SMKS St. Nahanson Parapat, dan 4) kontribusi dari para alumni yang terlibat dalam berbagai kegiatan, termasuk bantuan finansial maupun fasilitas. Besaran biaya pendidikan sangat terkait erat dengan kualitas pendidikan yang diberikan, termasuk layanan kepada siswa dan kebersihan sekolah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip pengelolaan sumber dana yang ada dalam teori telah berhasil diterapkan di SMKS St. Nahanson Parapat Sipoholon. Hal ini terlihat dari kesesuaian antara teori dan praktik di lapangan terkait dengan sumber-sumber dana pendidikan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada kepala sekolah dalam menentukan dan mengelola sumber-sumber dana sekolah, memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang sumber-sumber pendanaan yang tersedia untuk lembaga pendidikan mereka.

Kata kunci : Analisis, sumber dana, Pendidikan

ABSTRACT

To improve the expected quality of education, adequate funding is very important to support various aspects of financing. The quality of education cannot be improved without the allocation of sufficient financial resources. This research was conducted at SMKS St. Nahanson Parapat with the main aim of identifying the funding sources used by this institution. Understanding funding sources is considered crucial in the management of educational institutions to achieve the desired educational goals. This research is a type of qualitative research that uses a descriptive approach. The aim is to explain and describe information obtained from the field as data in research. The location of this research was at SMKS St. Nahanson Parapat Sipoholon, the research subject is the principal

at SMKS St. Nahanson Parapat Sipoholon. The data analysis method used refers to the theory of Miles and Huberman, which consists of several steps as follows: 1). Data Collection: Researchers collect data through interviews, observation and documentation. 2). Data Reduction: Researchers carry out selection return to the data that has been collected at the data analysis stage. 3). Data Presentation: The reduced data is presented by the researcher at this stage. 4). Drawing Conclusions: Before drawing conclusions, the researcher double-checks the data that has been collected. Funding for education is a shared responsibility between the government, regional governments and the community, and must be managed with the principles of justice, adequacy and sustainability. Efficiency, transparency and public accountability are also important principles in managing education funds. This source of funding is crucial in the effectiveness and efficiency of educational management. Sources of educational funding for St. Nahanson Parapat includes: 1) School Operational Assistance (BOS) from the Central Government, 2) Tuition Fees from Students, 3) St. Mary's Vocational School Foundation. Nahanson Parapat, and 4) contributions from alumni who are involved in various activities, including financial assistance and facilities. The amount of education costs is closely related to the quality of education provided, including services to students and school cleanliness. The results of this research show that the principles of managing financial resources that exist in theory have been successfully implemented at SMKS St. Nahanson Parapat Sipoholon. This can be seen from the compatibility between theory and practice in the field regarding educational funding sources. It is hoped that these findings will provide insight to school principals in determining and managing school funding sources, ensuring that they have a deep understanding of the funding sources available to their educational institutions.

Keywords : Analysis, funding sources, education

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan upaya yang dapat mempercepat pengembangan potensi manusia sehingga mereka dapat menjalankan tugas-tugas yang diamanatkan kepada mereka (Abin, 2007). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Taufiq dkk. (2022), kualitas pendidikan yang unggul akan mencerminkan kemajuan suatu negara. Akan tetapi, Indonesia masih menghadapi ketertinggalan dalam hal kualitas dan standar pendidikan jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, bahkan secara global. Berdasarkan data survei PISA (Programme for International Student Assessment) tahun 2019, Indonesia menempati peringkat 74 dari 79 negara, seperti yang dilaporkan oleh Kurniawati (2022).

Dalam meningkatkan mutu pendidikan yang diinginkan, tentu diperlukan sumber dana yang memadai untuk mendukung pembiayaannya. Kualitas pendidikan tidak akan bisa ditingkatkan jika sumber daya keuangan yang dialokasikan tidak mencukupi. Salah satu alasan Indonesia masih tertinggal dalam bidang pendidikan adalah karena terbatasnya dana yang tersedia jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Ini sejalan dengan gagasan bahwa negara-negara maju cenderung mengalokasikan anggaran yang besar untuk pendidikan, seperti yang diungkapkan oleh Santoso(2021). Tingginya alokasi dana pendidikan di negara-negara maju sebagian besar disebabkan oleh keputusan politik yang mendukung pentingnya investasi dalam bidang pendidikan.

Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya bertahap dalam meningkatkan anggaran pendidikan sesuai dengan kemampuannya. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang meliputi berbagai tingkatan pendidikan, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Selain itu, pemerintah juga mengatur penempatan dan pembayaran bagi para tenaga pendidik, termasuk guru, dosen, dan staf pendidikan yang terlibat dalam pengelolaan lembaga pendidikan.

Akan tetapi, jika dibandingkan dengan negara maju seperti Jepang, terdapat kesenjangan signifikan dalam hal gaji guru. Di Jepang, gaji rata-rata untuk seorang guru adalah sekitar Rp. 38 juta per bulan, dan bahkan untuk guru yang baru diangkat sekalipun, gajinya berkisar pada Rp. 17 juta per bulan, menurut Mansir (2020). Tingkat pendanaan yang tinggi untuk pendidikan di Jepang telah membawa kemajuan yang signifikan di sektor pendidikan, sementara Indonesia masih tertinggal jauh di belakang.

Berdasarkan berbagai penelitian, pembiayaan merupakan faktor penting dalam pembangunan sistem pendidikan. Tidak mungkin upaya pendidikan berlangsung tanpa memperhitungkan faktor biaya, menjadikan dana sebagai syarat utama dalam proses pendidikan, sebagaimana dijelaskan oleh Sakti & Hidayat (2019). Setiap institusi pendidikan diharuskan memiliki akses ke sumber pembiayaan yang cukup untuk menutupi biaya operasional agar dapat menyelenggarakan

proses pembelajaran yang berkualitas, sesuai dengan penjelasan Mujayaro & Rohmat (2020). Keberadaan sumber pembiayaan yang adekuat menjadi kunci untuk menghasilkan pembelajaran yang berkualitas dan efisien, yang berhubungan langsung dengan peningkatan kualitas pendidikan, seperti dipaparkan oleh Solehan (2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, meskipun tidak secara spesifik menyebutkan jenis-jenis pembiayaan pendidikan, terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu:

1. Pemerintah bertanggung jawab untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah secara penuh atau sebagian, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Pemerintah memiliki wewenang untuk memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk membiayai pendidikan dasar dan menengah.
3. Pemerintah memiliki hak untuk memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi atau membutuhkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
4. Perguruan tinggi diizinkan untuk mengenakan biaya pendidikan kepada mahasiswa, namun biaya yang ditetapkan haruslah wajar dan tidak bersifat diskriminatif.

Dari ketentuan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber pembiayaan pendidikan dapat berasal dari pemerintah, masyarakat, ataupun institusi pendidikan tinggi. Selain itu, ada program khusus yang dirancang untuk siswa berprestasi atau yang memerlukan bantuan untuk melanjutkan studi mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Pembiayaan di sektor pendidikan adalah unsur krusial. Tanpa adanya dukungan dana yang cukup, kemajuan dan pengembangan di bidang pendidikan akan mengalami kendala. Maka dari itu, penting bagi institusi pendidikan untuk mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber dana yang tersedia dengan maksimal, sehingga mereka dapat berfungsi dan berkembang secara efektif.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, pembiayaan pendidikan harus didasarkan pada prinsip keadilan,

kecukupan, dan keberlanjutan. Prinsip keadilan berarti alokasi dana pendidikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing pihak. Prinsip kecukupan menjamin bahwa dana yang dialokasikan harus memadai untuk mendanai semua aktivitas pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Sedangkan prinsip keberlanjutan menekankan pentingnya ketersediaan pendanaan pendidikan secara terus-menerus untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan yang konsisten dan berkelanjutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, salah satu bentuk pendidikan yang diakui adalah pendidikan kejuruan. Pasal 15 menggambarkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan bagian dari pendidikan menengah yang mengarahkan peserta didik ke bidang-bidang spesifik. Efektivitas pendidikan kejuruan, atau biasa disebut vocational education, dinilai berdasarkan kemampuannya dalam menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan tuntutan pasar. Prinsip mendasar dari pendidikan kejuruan adalah memberikan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat atau pasar kerja.

Menurut Dikmenjur (2006), tujuan utama dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah untuk mempersiapkan lulusannya agar dapat bekerja secara mandiri atau menempati posisi kerja yang sesuai dengan keahliannya. Meskipun SMK di Indonesia telah beroperasi selama beberapa dekade dan mampu menghasilkan tenaga kerja, tantangan yang dihadapi saat ini adalah adanya surplus tenaga kerja di pasar. Hal ini menyebabkan tingkat pengangguran di kalangan lulusan SMK menjadi tinggi.

Tantangan yang dihadapi oleh pendidikan kejuruan terkait dengan keterbatasan dana, sebagaimana ditegaskan oleh Gasskov (2000, hal. 201), yang menyoroti bahwa kurangnya pendanaan untuk pendidikan kejuruan menjadi masalah utama di beberapa negara karena anggaran pendidikan negara terbatas. Di negara-negara dengan sumber daya pendidikan yang terbatas, tantangan tambahan adalah bagaimana menggunakan dana secara efisien. Selain itu, biaya pendidikan kejuruan cenderung lebih tinggi daripada pendidikan umum lainnya. Menurut Gill (2008, hal. 184), biaya per unit di Sekolah Menengah Kejuruan

(SMK) rata-rata 40% lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah menengah umum. Data juga menunjukkan bahwa biaya operasional non-personalia di sekolah kejuruan, khususnya dalam kelompok program studi keahlian Teknik Bangunan, rata-rata lebih besar 49,10% dibandingkan dengan sekolah menengah umum (Permendiknas No. 69; 2009).

Berdasarkan data yang disajikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terjadi perkembangan positif dalam jumlah SMK swasta di Sumatera Utara pada tahun ajaran 2016/2017, mencapai 688 sekolah. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana pada tahun ajaran 2015/2016 terdapat 668 sekolah SMK di wilayah tersebut. Sekolah, sebagai lembaga nirlaba, aktif melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan, termasuk dalam hal penerimaan dan pengeluaran dana. Sumber pendanaan sekolah berasal dari pemerintah, dana internal sekolah, dan juga sumbangan dari donatur. Peran pemerintah dalam pendanaan pendidikan tercermin dari alokasi anggaran sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2017 yang dialokasikan untuk sektor pendidikan.

SMK St. Nahanson Parapat merupakan sebuah sekolah menengah kejuruan (SMK) swasta yang terletak di Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara. SMK St. Nahanson Parapat menyediakan dua jurusan, yaitu teknologi kendaraan ringan dan teknik komputer jaringan. Sekolah ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas, termasuk bengkel, asrama dengan kapasitas 200 orang, gereja, Gedung Olah Raga (GOR), dan 20 unit rumah untuk guru. SMK St. Nahanson Parapat memiliki bengkel yang terstandarisasi Astra dan diakui sebagai sekolah percontohan di Kabupaten Tapanuli Utara.

Tulisan ini berfokus pada SMK St Nahanson Parapat di Sipoholon, yang merupakan sebagai sekolah percontohan di Kabupaten Tapanuli Utara. Penulis tertarik untuk menganalisis sumber-sumber dana yang digunakan oleh sekolah ini dalam mengelola operasinya. Informasi yang disajikan di dalam tulisan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan meningkatkan pemahaman, terutama dalam konteks manajemen keuangan sekolah, dengan

mengeksplorasi berbagai sumber dana pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Tujuannya adalah untuk menjelaskan dan menggambarkan informasi yang diperoleh dari lapangan sebagai data dalam penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di SMKS St. Nahanson Parapat Sipoholon, dengan subjek penelitian adalah kepala sekolah di SMKS St. Nahanson Parapat Sipoholon. Metode analisis data yang digunakan mengacu pada teori Miles dan Huberman, yang terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut: 1). Pengumpulan Data: Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. 2). Reduksi Data: Peneliti melakukan seleksi kembali terhadap data yang telah terkumpul pada tahap analisis data. 3). Penyajian Data: Data yang telah direduksi disajikan oleh peneliti pada tahap ini. 4). Penarikan Kesimpulan: Sebelum menarik kesimpulan, peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap data yang telah dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pendidikan (Gamar, 2019). Secara esensial, pembiayaan pendidikan adalah proses pengalokasian sumber daya ke berbagai kegiatan atau program yang mendukung operasional pendidikan, termasuk proses pembelajaran di dalam kelas (Matin, 2014:4). Mengingat kompleksitas pendidikan, diperlukan alokasi dana yang cukup besar. Setiap aspek pendidikan yang mendukung kelancaran proses pembelajaran harus dipenuhi, dan semua itu memerlukan pendanaan yang memadai. Dengan kata lain, pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan dana, terutama di lembaga pendidikan formal.

Dalam Amandemen ke-IV UUD 1945 Republik Indonesia, pembiayaan pendidikan diatur secara eksplisit. Menurut pasal ini, setiap individu berhak atas akses pendidikan, dan pemerintah memiliki kewajiban untuk membiayai pendidikan dasar bagi warganya. Pemerintah juga bertugas untuk menjamin dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan bangsa, memperkuat keimanan, ketakwaan, dan memperbaiki akhlak

mulia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional secara spesifik mengatur bahwa alokasi anggaran pendidikan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Meskipun demikian, diperlukan penelaahan lebih mendalam mengenai distribusi dan pemetaan anggaran tersebut. Hal ini menjadi krusial mengingat alokasi dana pendidikan dari pemerintah pusat dan daerah masih belum memenuhi ekspektasi. Proporsi alokasi sebesar 20% yang ditetapkan belum terdistribusi secara merata ke semua program pendidikan dan belum memadai untuk memenuhi delapan standar pendidikan di setiap lembaga pendidikan. Dikatakan dalam Pasal 11 Ayat 2 dari Undang-Undang ini bahwa ada kewajiban dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memastikan ketersediaan dana pendidikan untuk warga negara berumur tujuh hingga lima belas tahun.

Pendanaan pendidikan di Indonesia adalah tanggung jawab gabungan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Pengelolaan dana di bidang pendidikan harus dilakukan dengan berpegang teguh pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas terhadap publik. Paling sedikit, 20% dari APBN dan APBD harus dialokasikan untuk sektor pendidikan, termasuk untuk gaji guru dan dosen yang diangkat oleh pemerintah.

Lembaga pendidikan, mulai dari prasekolah, sekolah, hingga perguruan tinggi, merupakan organisasi yang membutuhkan sumber dana untuk mengelola semua aspek yang dimilikinya (Ginancar et al., 2022). Sarana dan prasarana yang ada memerlukan biaya untuk pengelolaan dan pemeliharaan. Misalnya, gedung yang telah digunakan selama beberapa tahun membutuhkan biaya untuk renovasi dan pemeliharaan, seperti pengecatan ulang atau perbaikan jika terjadi kerusakan. Peralatan dan fasilitas yang digunakan di lembaga pendidikan juga memerlukan biaya untuk operasional, pemeliharaan, dan penggantian jika rusak.

Di Indonesia, lembaga pendidikan memiliki beragam jenis, baik dalam hal kepemilikan, pengelolaan, maupun pembiayaannya. Ada lembaga pendidikan

negeri yang sepenuhnya didanai oleh pemerintah, ada juga lembaga swasta yang lebih mengandalkan sektor swasta untuk pembiayaan mereka, meskipun terkadang mereka juga menerima bantuan dari pemerintah. Bahkan, beberapa lembaga pendidikan swasta menolak bantuan dari pemerintah.

Pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada lembaga pendidikan seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan mereka, termasuk lembaga pendidikan negeri. Hal ini tercermin dari masih banyaknya lembaga pendidikan negeri yang mengalami kekurangan sarana dan prasarana. Lembaga pendidikan swasta juga harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan mereka secara mandiri. Kondisi ini menyebabkan lembaga pendidikan di Indonesia tidak dapat sepenuhnya bergantung pada pemerintah dalam hal pembiayaan.

Pada hakikatnya, Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan bahwa tanggung jawab atas pendidikan ada pada Negara. Ini menunjukkan bahwa pada dasarnya, Negara harus menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam mengelola proses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Permasalahan anggaran atau sumber dana juga menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan sistem pendidikan secara keseluruhan. Meskipun uang bukanlah satu-satunya faktor penentu kualitas pendidikan, namun tidak bisa disangkal bahwa setiap kegiatan pendidikan memerlukan dukungan finansial. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja sistem pendidikan, manajemen penganggaran juga harus diperbaiki, karena alokasi anggaran seharusnya mendukung semua kegiatan pendidikan yang dilakukan (Azhari dan Kurniady, 2016).

Sumber dana adalah elemen penting yang secara langsung mendukung efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan. Oleh karena itu, setiap lembaga pendidikan harus memahami dengan baik asal-usul dana yang mereka terima. Nanang Fatah, dalam bukunya tentang Standar Pembiayaan Pendidikan, menjelaskan bahwa sumber-sumber keuangan sekolah bisa berasal dari beragam pihak, termasuk orang tua siswa, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dunia usaha, dan juga alumni. Begitu juga, Mustari menekankan bahwa sumber dana dan pembiayaan di sebuah sekolah umumnya

dapat diperoleh dari dana pemerintah, sumbangan dari orang tua siswa, partisipasi masyarakat, kontribusi dari alumni, dana dari peserta kegiatan, serta hasil dari kegiatan wirausaha sekolah.

Pengaturan pembiayaan pendidikan harus diselenggarakan dengan baik karena selain dari dana APBN/APBD, sumber pendanaan pendidikan juga dapat berasal dari masyarakat melalui SPP siswa. Adanya beragam bentuk dan jenis lembaga pendidikan menyebabkan adanya beragam sumber dana untuk pembiayaannya.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Sekolah SMKS St.Nahanson Parapat Sipoholon, dapat diketahui bahwa SMKS St. Nahanson Parapat memiliki berbagai sumber pendanaan yang memadai untuk menjalankan proses pendidikannya dengan efektif. Sumber-sumber dana tersebut meliputi: 1) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat, 2) Iuran SPP dari Peserta didik, 3) Yayasan SMKS St. Nahanson Parapat, dan 4) kontribusi dari para alumni yang terlibat dalam berbagai kegiatan dan memberikan dukungan baik finansial maupun fasilitas.

Bantuan Operasional Sekolah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, negara memiliki tanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan untuk seluruh lapisan masyarakat. Ini berarti bahwa negara memiliki kewajiban dalam menangani berbagai aspek pendidikan untuk semua kelompok masyarakat (Ridwan & Sakdiyah, 2022). Sebagai bagian dari praktiknya, pemerintah pusat menetapkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang digunakan untuk mendanai berbagai keperluan dalam pendidikan seperti fasilitas pendidikan, gaji guru, dan lain-lain.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu bentuk dukungan finansial dari pemerintah pusat untuk sektor pendidikan. Dana ini diberikan kepada tiap siswa berdasarkan jenjang pendidikannya dan harus dikelola sesuai dengan pedoman operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dana BOS tersedia bagi semua sekolah yang memiliki izin operasional dari pemerintah, termasuk sekolah swasta yang

dioperasikan oleh yayasan atau komunitas masyarakat.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah upaya pemerintah untuk memberikan kontribusi finansial secara langsung ke sekolah-sekolah, termasuk institusi pendidikan negeri dan swasta, untuk menunjang keperluan operasional non-gaji dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dasar yang wajib. Besaran dana yang dialokasikan untuk masing-masing sekolah dihitung berdasarkan jumlah pelajar yang terdaftar, dikalikan dengan nominal bantuan per pelajar. Berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 (PP 48/2008) mengenai Pendanaan Pendidikan, biaya operasional non-gaji ini meliputi penggunaan bahan atau alat pendidikan yang terpakai habis, serta berbagai biaya tidak langsung seperti untuk utilitas (listrik dan air), layanan telekomunikasi, pemeliharaan fasilitas, biaya lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dan lain-lain. Meskipun secara umum dana BOS dialokasikan untuk pengeluaran non-personalia, ada beberapa pengeluaran untuk investasi dan gaji yang dapat dibiayai melalui dana BOS, sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Republik Indonesia, 2008).

Dana BOS ditujukan untuk menanggung biaya operasional non-personalia sekolah, termasuk biaya untuk pengembangan perpustakaan dan peningkatan kesejahteraan guru, dengan ketentuan bahwa dana tersebut harus dipergunakan secara eksklusif untuk keperluan sekolah, bukan kepentingan pribadi. Setiap sekolah penerima dana BOS diharuskan untuk menyampaikan laporan penggunaannya kepada pemerintah.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMKS St. Nahanson Parapat Sipoholon, terkait sumber pendanaan dari Pemerintah Pusat, dinyatakan bahwa SMKS St. Nahanson Parapat Sipoholon menerima Bantuan Dana Operasional Sekolah (BOS) yang disalurkan setiap tiga bulan dengan jumlah Rp1.600.000 per siswa. Dalam pengelolaan dana BOS, SMKS St. Nahanson Parapat Sipoholon telah menerapkan sistem digital melalui aplikasi. Setiap kali ada kebutuhan untuk menggunakan dana BOS, sekolah perlu mengajukan permohonan terlebih dahulu untuk mendapatkan persetujuan dari pihak pusat. Setelah mendapatkan persetujuan, baru dana dapat digunakan dan menjadikan proses penggunaan dana BOS terstruktur dan

transparan. Selain itu, dalam kondisi dimana dana BOS mengalami keterlambatan, sekolah mendapatkan dukungan finansial sementara dari dana yang disediakan oleh Yayasan yang menaunginya.

Yayasan

Lembaga pendidikan swasta yang berdiri di bawah naungan sebuah yayasan umumnya mengandalkan yayasan tersebut sebagai sumber utama untuk pembiayaannya. Di sisi lain, ketika sebuah lembaga pendidikan berstatus negeri, kebergantungan terhadap yayasan untuk pembiayaan berkurang karena adanya dukungan dana dari pemerintah.

Yayasan yang mendirikan lembaga pendidikan bisa mendapatkan dana melalui usaha yang didirikan khusus untuk mendukung pengembangan lembaga pendidikan tersebut. Tak hanya itu, yayasan juga bisa bergantung pada sumbangan dari donor, baik yang tetap maupun yang tidak tetap. Yayasan memiliki tanggung jawab untuk menghimpun dan menggunakan dana tersebut dengan bijak, sesuai dengan kebutuhan pengembangan lembaga pendidikan yang dikelolanya.

Terkait dengan Lembaga Pendidikan SMKS St. Nahanson Parapat Sipoholon, informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Sekolah mengungkapkan tentang bantuan finansial dari Yayasan. Bantuan ini diberikan kepada SMKS St. Nahanson Parapat Sipoholon oleh yayasan untuk menutupi kekurangan dana apabila terjadi keterlambatan dalam pencairan dana BOS dan ketika pendapatan dari SPP tidak mencukupi kebutuhan operasional sekolah.

Peserta Didik

Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) adalah biaya yang dibayarkan oleh siswa atau wali murid kepada sekolah. Dalam konteks sekolah, SPP menjadi salah satu sumber pendapatan yang vital bagi lembaga pendidikan. Dana yang diperoleh dari SPP membantu kelangsungan operasional sekolah dan menyediakan layanan pendidikan berkualitas bagi siswa.

Selain memfasilitasi penyediaan layanan pendidikan yang lebih baik, SPP juga mendorong keterlibatan orang tua, menyediakan dana operasional bagi sekolah, dan mendukung keberlanjutan lembaga pendidikan secara keseluruhan. Bagi lembaga pendidikan swasta atau yang dikelola secara mandiri, pengelolaan biaya didasarkan pada kebutuhan sekolah yang direncanakan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar (Munir, 2013).

Mengacu pada informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Sekolah SMKS St.Nahanson Parapat Sipoholon, terkait sumber pendanaan dari Peserta didik, dinyatakan bahwa SMKS St. Nahanson Parapat Sipoholon menerima sumber dana dari siswa berupa biaya SPP bulanan sebanyak Rp. 210.000 per siswa. Pembayaran ini dijadwalkan secara rutin setiap bulan.

Alumni

Kontribusi dari alumni sebagai bentuk dukungan terhadap almamaternya merupakan sumber pendanaan yang signifikan dan patut dipertimbangkan, terutama mengingat jumlah alumni yang terus bertambah setiap tahun, banyak di antaranya telah berhasil secara ekonomi (Ruslan, 2021). Potensi dari sumbangan alumni ini sangat besar.

Biasanya, penggalangan dana dari alumni dilakukan melalui organisasi persatuan alumni. Pemanfaatan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook memudahkan lembaga pendidikan dalam mengumpulkan dana dari alumni. Pengelolaan dana alumni ini dilakukan dengan fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan lembaga.

Berkaitan dengan Lembaga Pendidikan SMKS St. Nahanson Parapat Sipoholon, dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, diketahui bahwa lembaga ini juga mendapatkan sumber pendanaan tidak rutin dari alumni yang telah bekerja. Alumni memberikan kontribusi atau

apresiasi kepada sekolah, terutama ketika sekolah menyelenggarakan kegiatan atau berpartisipasi dalam perlombaan di luar sekolah yang bertujuan memperebutkan juara.

Orang Tua Asuh

Orang tua asuh adalah individu yang mengambil alih peran orang tua dan bertanggung jawab atas pembiayaan, pembinaan sikap, serta pengawasan perkembangan anak asuhnya secara sukarela (Ridwan & Sakdiyah, 2022). Mereka umumnya menyokong biaya pendidikan anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu secara finansial setelah resmi menjadi orang tua asuh.

Umumnya, dukungan keuangan dalam pendidikan dari orang tua asuh berlangsung di lembaga panti asuhan, meskipun ada juga yang memberikan dukungan pendidikan kepada anak asuh yang tinggal bersama orang tua kandung mereka. Terkadang, orang tua asuh juga saling membantu dengan memberikan subsidi antar wali murid jika anak-anak mereka bersekolah di institusi yang sama.

Unit Usaha Lembaga Pendidikan

Saat ini, banyak lembaga pendidikan telah mengembangkan unit-unit usaha sendiri untuk mendukung pembiayaan operasional mereka. Lembaga pendidikan swasta yang dikelola secara modern biasanya sudah memiliki unit usaha independen, yang memungkinkan mereka untuk membiayai operasi tanpa harus bergantung pada dana dari luar.

Sekolah-sekolah negeri pun semakin banyak yang mendirikan unit usaha. Beberapa contoh umum dari unit usaha yang dikelola oleh lembaga pendidikan termasuk koperasi, warung serba ada (waserda), dan kantin. Ada juga lembaga pendidikan yang mengoperasikan bisnis yang lebih besar seperti swalayan, pabrik, atau peternakan. Keberadaan unit-unit usaha ini memberikan sumber pendanaan tambahan bagi lembaga

pendidikan, membantu mereka untuk mencapai kemandirian finansial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, terdapat kesesuaian antara teori dan praktik pengelolaan Sumber Dana Pendidikan di Lembaga Pendidikan SMKS St. Nahanson Parapat Sipoholon. Analisis ini menunjukkan bahwa apa yang diuraikan dalam kajian teori oleh Ekowati, Sunandar, dan Murniati pada tahun 2019 mengenai sumber dana pendidikan telah diaplikasikan dan dapat ditemukan persamaannya di lembaga tersebut.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa SMKS St. Nahanson Parapat memiliki berbagai sumber pendanaan yang memadai untuk menjalankan proses pendidikannya dengan efektif. Sumber-sumber dana tersebut meliputi: 1) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat, 2) Iuran SPP dari Peserta didik, 3) Yayasan SMKS St. Nahanson Parapat, dan 4) kontribusi dari para alumni yang terlibat dalam berbagai kegiatan dan memberikan dukungan baik finansial maupun fasilitas. Besarnya biaya pendidikan dan sumber dana ini memiliki keterkaitan langsung dengan kualitas pendidikan yang diberikan, termasuk pelayanan terhadap siswa, kebersihan sekolah, dan faktor lainnya. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan sumber-sumber pendanaan dalam pendidikan yang tersedia di lembaga tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aslindah, Andi, and Widyatmike Gede Mulawarman. "Membangun Masa Depan Melalui Manajemen Keuangan Pendidikan Yang Efektif." *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan (JIMPIAN)*, vol. 2, no. 2, 2022, pp. 65–74, <https://doi.org/10.30872/jimpian.v2i2.2606>.
- Fiandi, Arif. "Sumber-Sumber Dana Pendidikan." *Jurnal Basicedu*, vol. 6, no. 6, 2022, pp. 10414–21, <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i6.4391>.
- Fitriah, M. "Analisis Pengelolaan Dana Pendidikan Di SMA Negeri 43 Jakarta." *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2021,

- <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/63723>.
- Futaqi, Sauqi. "Manajemen Pengetahuan Dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam." *TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, vol. 3, no. 2, 2020, pp. 210–29, <https://doi.org/10.52166/talim.v3i2.2370>.
- Habibi, Ahmad, and Lesmana Putera. "Analisis Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Sekolah." *Manajemen Administrasi Sekolah*, vol. 1, no. 1, 2022, pp. 12–20.
- Herawan, Endang, and Enceng Yana. "Analisis Pembiayaan Pendidikan Lembaga Pendidikan Swasta (Studi Kasus Pada Lembaga Pendidikan Kursus Di Kota Cirebon)." *Prosiding Seminar Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis*, 2017, pp. 1–6, <http://www.jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/snpe/article/download/10643/7889%0Ahttp://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/snpe/article/viewFile/10643/7889>.
- Hidayah, Nurul, and Nurfuadi. "Penggalan Sumber Dana Pendidikan." *EduCurio Journal*, vol. 1, no. 2, 2022, pp. 660–65, <https://qjurnal.my.id/index.php/educurio>.
- Ii, B. A. B. *Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia* 7. 2014, pp. 7–27.
- Mujayaro, Mujayaro, and Rohmat Rohmat. "Pengelolaan Dan Pengalokasian Dana Pendidikan Di Lembaga Pendidikan." *Arfannur*, vol. 1, no. 1, 2020, pp. 41–54, <https://doi.org/10.24260/arfannur.v1i1.151>.
- Ramadhan, M. Agphin, and Sugiyono Sugiyono. "Pengembangan Sumber Dana Sekolah Pada Sekolah Menengah Kejuruan." *Jurnal Pendidikan Vokasi*, vol. 5, no. 3, 2015, p. 340, <https://doi.org/10.21831/jpv.v5i3.6488>.
- Ridwan, Ahmad, and Halimatun Sakdiyah. "Analisis Sumber Dana Pendidikan Yayasan Perguruan Islam Al-Kautsar Kecamatan Medan Johor." *Hibrul Ulama*, vol. 4, no. 1, 2022, pp. 19–27, <https://doi.org/10.47662/hibrululama.v4i1.168>.
- Solehan, Solehan. "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, vol. 6, no. 1, 2022, pp. 98–105, <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3046>.
- Susanto, Daris, and Alfi Maulia Rahma. "Jenis-Jenis Pembiayaan Untuk Penyelenggaraan Pendidikan." *Jurnal Pelita Nusantara*, vol. 1, no. 2, 2023, pp. 233–37, <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i2.201>.
- Yoto. "Analisis Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia (Suatu Kajian Praktis Dalam Sistem Pengelolaan Anggaran Pendidikan Pada Sekolah Menengah Umum Dan Kejuruan)." *Jurnal Teknik Mesin*, vol. 20, no. 1, 2012, pp. 78–93, <http://journal.um.ac.id/index.php/teknik-mesin/article/view/2946>.
- Zainuddin, Anwar, et al. "ANALISIS SUMBER DANA PENDIDIKAN LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF 2 NURUL HUDAADIREJO KECAMATAN JABUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR." *UNISAN JOURNAL : Jurnal Manajemen & Pendidikan Islam*, vol. 01, no. 04, 2022, pp. 223–33, <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/unisanjournal>.